

## STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN BERBASIS KEUNIKAN AGROEKOSISTEM DAN KELEMBAGAAN LOKAL\*

Siti Amanah\*\* dan Narni Farmayanti\*\*\*

### Abstract

*Fishermen empowerment based on local institutions and the uniqueness of the ecosystem is an important effort to improve the quality of life of the fishermen. Condition of coastal ecosystems that is vulnerable to environmental changes, social, and economic pressures worsen the lives of small fishermen. The study was conducted in Muara and Tanjung Pasir, two coastal villages in Tangerang District, Banten Province. The purposes of the study were to compare the conditions of the two coastal villages, and to draw alternative empowerment strategy. Thirty households from the two villages were selected as respondents. Data were obtained by survey techniques, focus group discussions, interviews with key informants, and secondary data searches. The research findings showed that there were differences in the capacity of fishermen where the fishermen in the Tanjung Pasir village had greater development opportunities. There were significant differences of household income among fishermen, local institutions in Muara were still weak in acting as a forum for learning, cooperation, and self-development. Empowerment strategies could be developed through social learning approaches in managing coastal ecosystem, strengthening cooperation of the groups both internally and externally, as well as developing fishermen groups to diversify the business.*

*Keywords: small fishermen, uniqueness of ecosystems, coastal management, social institutions.*

### Abstrak

*Pemberdayaan nelayan berbasis kelembagaan lokal dan keunikan agroekosistem merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan. Kondisi ekosistem pesisir yang semakin rentan akan perubahan lingkungan, sosial, dan tekanan ekonomi memperburuk kehidupan nelayan kecil. Penelitian dilaksanakan di dua desa pesisir dengan kasus di Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Responden rumah tangga terpilih sebagai unit analisis adalah sebanyak 30 RT dari dua desa. Data diperoleh dengan teknik survei, diskusi kelompok terfokus, wawancara dengan informan kunci, dan penelusuran data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kapasitas nelayan di dua desa dalam pengelolaan pesisir di mana nelayan di Desa Tanjung Pasir memiliki peluang pengembangan yang lebih besar; terdapat perbedaan yang nyata dalam pendapatan antara nelayan di dua desa; kelembagaan lokal masih lemah dalam berperan sebagai wadah belajar, kerjasama, dan pengembangan diri. Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembelajaran sosial pengelolaan agroekosistem pesisir, penguatan kerjasama dalam kelompok, dan kerjasama dengan lembaga eksternal kelompok untuk diversifikasi dan pengembangan usaha.*

*Kata-kata kunci: nelayan kecil, keunikan ekosistem, pengelolaan pesisir, kelembagaan sosial.*

---

\* Artikel telah direvisi sesuai masukan saat Simposium Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) 18 November 2010.

\*\* Penulis Utama, Koordinator/Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Telepon: +622518425252; Faksimili: +62251627793, Email: sitihanama@gmail.com; siti\_amanah@ipb.ac.id

\*\*\*Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

strategi alternatif pemberdayaan nelayan berdasarkan potensi keunikan agroekosistem pesisir dan kelembagaan lokal.

## II. METODOLOGI

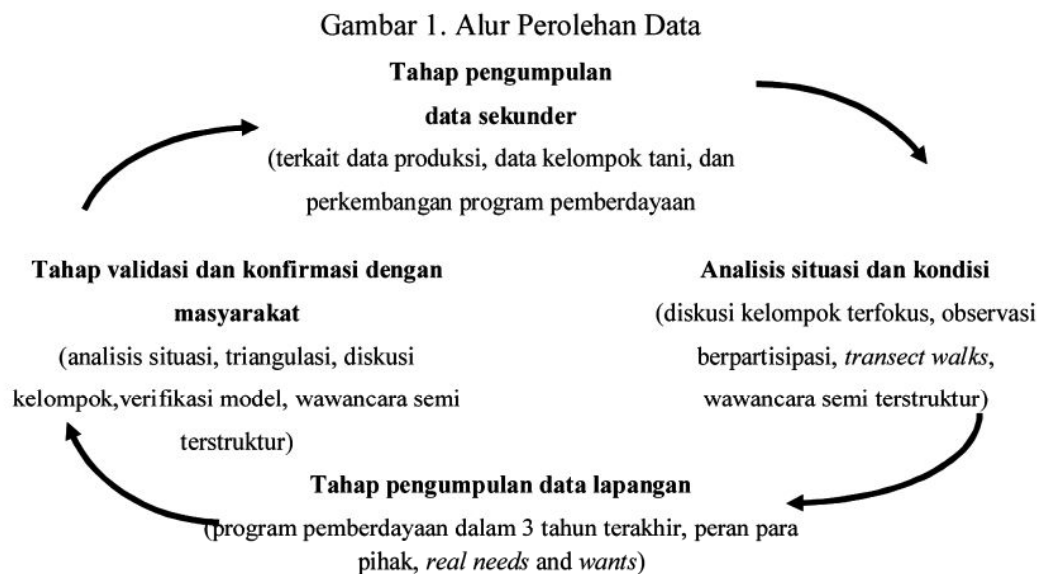
Penelitian dirancang dengan desain studi kasus di dua desa pesisir: Tanjung Pasir dan Muara. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang dan Badan Pusat Statistik. Data primer didapat dari 30 responden nelayan, informan terdiri atas tokoh masyarakat, pimpinan dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan, dan pengawas perikanan. Untuk memvalidasi data digunakan teknik triangulasi. Secara skematik, alur perolehan data diilustrasikan pada Gambar 1.

komunitas dan pemangku kepentingan terkait dua desa kajian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan Karakteristik Nelayan di Dua Desa

Desa Tanjung Pasir dan Muara merupakan dua desa pesisir di wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penduduk Desa Tanjung Pasir dua kali lebih banyak daripada penduduk Desa Muara (Tabel 1). Lokasi Desa Muara lebih sulit dijangkau daripada Desa Tanjung Pasir, terpencil, dan infrastruktur jalan tidak memadai. Desa Tanjung Pasir dibanding Desa Muara lebih sering menjadi lokasi pelaksanaan program pemberdayaan, khususnya dari sektor perikanan. Perikanan tangkap merupakan sumber ekonomi nelayan di



Terdapat tiga faktor yang dianalisis untuk mengetahui perkembangan keberdayaan nelayan, yakni kelembagaan lokal, kemampuan nelayan mengelola agroekosistem pesisir, dan pendapatan rumah tangga. Strategi pemberdayaan nelayan diformulasikan melalui telaah atas program pemberdayaan terdahulu dan melalui diskusi kelompok di tingkat

dua desa. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Tanjung Pasir dan cukup membantu masyarakat nelayan di desa ini.

Desa Muara mayoritas merupakan nelayan dari desa setempat dengan usaha perikanan tangkap bersifat subsisten. Beberapa karakteristik nelayan di Desa Tanjung Pasir dan Muara disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Karakteristik Nelayan Responden di Desa Tanjung Pasir dan Muara 2010**

No	Keterangan	Desa Tanjung Pasir	Desa Muara
1.	Umur rata-rata (tahun)	42	41
2.	Jenis kelamin :		
	- Laki-laki	12	13
	- Perempuan	3	2
3.	Tingkat pendidikan :		
	- Tidak sekolah	2	3
	- Tidak tamat SD	3	1
	- SD	9	11
	- SMP	-	-
	- SMA	1	-
4.	Kegiatan Usaha:		
	-Nelayan	13	13
	-Pengolah ikan	2	1
	-Pedagang ikan	-	1
5.	Pengalaman usaha (tahun)	29.1	25
6.	Penghasilan rata-rata (Rp/tahun)	12.440.000	9.207.143

Sumber: Data primer hasil penelitian, 2010

Rataan usia nelayan di dua desa tersebut berada pada kategori produktif, dengan tingkat pendidikan rata-rata SD, dan pengalaman sebagai nelayan sekitar dua puluh tahunan. Berarti selepas SD, para pemuda di dua desa tersebut langsung terjun sebagai nelayan. Kegiatan wanita nelayan di Desa Tanjung Pasir lebih berfokus kepada pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Di Desa Muara, terdapat pembuatan terasi dengan skala mikro dengan pasar terbatas di sekitar desa. Pendapatan nelayan di Desa Tanjung Pasir 35 persen lebih tinggi daripada nelayan di Desa Muara. Hal ini berkaitan dengan akses kepada

sarana dan prasarana perikanan yang jauh lebih mudah dan tersedia di Desa Tanjung Pasir. Fasilitas yang tersedia di desa tersebut meliputi Tempat Pelelangan Ikan, Kios sarana produksi perikanan, ketersediaan Bahan Bakar Minyak, dan infra struktur jalan raya yang jauh lebih baik daripada di Desa Muara.

Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan mutlak dibutuhkan oleh komunitas nelayan. Selain itu, dalam sistem perikanan, diperlukan keterkaitan dan subsistem yang saling mendukung yakni, sub sistem terkait dengan sosial ekonomi masyarakat (humanistik), sub sistem ekosistem alam dan perairan, dan manajemen sistem (Charles, 2001). Dinamika di dalam sub sistem sangat dipengaruhi oleh pergolakan di dalam subsistem itu dan pengaruh eksternal seperti perubahan dalam struktur hak penguasaan perairan, kerusakan sumber daya pesisir dan laut, dan perangkat peraturan lain yang berpotensi menghambat mobilisasi *vertikal* nelayan kecil. Hal inilah yang dialami oleh nelayan di Desa Muara. Nelayan setempat dihadapkan pada kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang semakin menurun kualitasnya meliputi pencemaran air laut oleh limbah pabrik, muara dengan sedimentasi semakin tinggi, dan kelembagaan nelayan yang perlu berkembang menjadi lebih kuat dan terorganisir.

Diskusi kelompok berfokus (FGD) di dua desa nelayan menghasilkan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan dan strategi pemberdayaan yang berfokus pada kondisi agroekosistem pesisir dan laut, menggalang kemandirian, mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal, pendampingan baik oleh penyuluh atau agen pembaharu lainnya yang dapat ditindaklanjuti oleh nelayan setempat, dan melindungi hak-hak nelayan kecil dalam pengelolaan wilayah pesisir. Berkaitan dengan hak-hak nelayan kecil, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menimbulkan perdebatan pada 4 pasal dari 80 pasal yang ada. Hal tersebut

dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pesisir meliputi komunitas nelayan, masyarakat setempat, wisatawan, “pelarung” abu kremasi, pabrik yang membuang limbah yang bermuara di perairan Desa Muara, dan pemerintah sendiri. Dengan demikian, pendekatan multistakeholder sangat diperlukan dalam mendorong lahirnya kebijakan pemberdayaan nelayan.

Model pemberdayaan nelayan sudah diterapkan oleh pemerintah sejak empat dasawarsa, seperti pemberdayaan petani dan nelayan kecil (PNK), program kredit atau pinjaman dengan bunga lunak, PEMP, Program Mitra Bahari, dan Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Selain menuai sukses, ada kecenderungan masyarakat berpersepsi, bahwa program pemerintah merupakan bantuan atau *charity* semata. Sehingga, dalam pelaksanaannya, perguliran dana oleh kelompok penerima manfaat program tidak berjalan semestinya. Hal ini merusak tata nilai yang ada dan menimbulkan kebergantungan dari nelayan ke kekuatan eksternal. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang perlu dibenahi terlebih dahulu di tataran masyarakat adalah pengembangan nilai-nilai positif akan kerja sama, komitmen, dan *trust*. Nilai-nilai ini perlu dilembagakan dalam pranata sosial masyarakat melalui pendekatan yang holistik. Penanaman nilai-nilai dapat dilakukan melalui level keluarga, kelompok, masyarakat. Hal tersebut perlu dicontohkan oleh tokoh masyarakat baik pemimpin formal

maupun informal, termasuk oleh penyuluh, yakni tentang pentingnya mengelola dan memelihara lingkungan pesisir, perencanaan usaha, pengembangan jaringan kerja sama, dan kelembagaan kelompok usaha.

Keberadaan penyuluh perikanan mutlak diperlukan untuk turut serta mendorong terjadinya perubahan perilaku pada komunitas nelayan. Pendekatan penyuluhan yang tepat bukanlah dalam kerangka linier yang cenderung bersifat transfer teknologi, tetapi perlu mengutamakan pembelajaran dari dan oleh masyarakat nelayan itu sendiri, menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga prinsip *self-help* atau *help people to help themselves* menjadi penting.

Penyuluh dapat berperan lebih banyak sebagai fasilitator, konsultan, partner, dan menjembatani antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Meskipun demikian, dalam konsepsi pemberdayaan, penyuluh perikanan perlu memiliki “inovasi” andalan untuk memfasilitasi masyarakat. Bentuk-bentuk inovasi meliputi inovasi kelembagaan, efisiensi usaha, higienitas dalam pengolahan, diversifikasi usaha, dan pengelolaan investasi oleh pelaku utama (nelayan dan pengolah) di Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara. Strategi pemberdayaan nelayan seyogyanya terintegrasi dalam program penyuluhan melalui penetapan tujuan, pendekatan, *output*, pendekatan, dan *outcome* (Tabel 3).

**Tabel 3. Formulasi Strategi Pemberdayaan Nelayan**

No	Uraian	Kegiatan	Asumsi
1	<p>Tujuan/<i>Goals</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya daya saing produk perikanan dan pendapatan nelayan</li> <li>- Maksud/<i>Purpose/s</i></li> <li>- Pemberdayaan komunitas berbasis agroekosistem dan kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian potensi pesisir dan perikanan oleh masyarakat</li> <li>- Pengembangan kelembagaan kelompok usaha</li> <li>- Diklat manajemen usaha (perencanaan, daya saing, dan diversifikasi usaha)</li> </ul>	<p>Masyarakat nelayan memiliki kemauan untuk maju, memiliki kebutuhan untuk meningkatkan daya saing. Jika belum memiliki kemauan, diperlukan peran pendamping dalam pengembangan kesadaran tersebut.</p>